



BAPENDA
SUMATERA SELATAN



PERENCANAAN KINERJA BAPENDA

JANGKA PANJANG TAHUN 2013 - 2035

**BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN JL. POM IX KAMPUS PALEMBANG**

TELP. 0711 – 310633 FAX 0711 – 319819 KODE POS 30137



A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sementara Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Seiring tuntutan agar setiap organisasi publik selalu terbuka dan transparan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka organisasi publik harus membuat suatu Rencana Strategik (Strategik Plan), Rencana Kinerja (*Performance Plan*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*) yang dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan menyusun dokumen perencanaan kinerja diharapkan organisasi mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik dan lebih fokus. Dokumen Perencanaan Kinerja ini antara lain berisikan ringkasan dari rencana strategis dan uraian lebih lanjut dari setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik dan strategi pencapaiannya.

Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang harus dijalankan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang tertuang di dalam Dokumen Perencanaan untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah demi mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel untuk memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Kinerja Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian proses sistematis dari beberapa aktivitas, alat, sumber daya serta prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan, pengklasifikasian, pengiktisaran, metodologi dan analisis, serta pelaporan pada tingkatan level instansi pemerintah/pemerintah daerah dalam rangka pertanggungjawaban keuangan dan kinerja serta peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah dalam kurun waktu jangka panjang, jangka menengah serta jangka pendek. Dokumen tersebut menyediakan dasar bagi *core business* organisasi secara *sustainable* untuk meningkatkan kinerja dari organisasi dan menyediakan kerangka untuk rencana kinerja tahunan.

Penyusunan dokumen perencanaan kinerja tidak terlepas dari pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dari sebuah sistem penganggaran dari Perangkat Daerah. Kaitan dengan anggaran berbasis kinerja tetap harus dipertimbangkan dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran strategis serta strategi pencapaiannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem penganggaran. Anggaran Perangkat Daerah dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan sehingga tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya juga harus disesuaikan dengan perubahan anggaran tersebut.

Dokumen Perencanaan Kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah memuat standart baku dalam perencanaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk Dokumen Perencanaan Kinerja jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Dokumen Perencanaan Kinerja merupakan dokumen kinerja yang memuat dan menyajikan berbagai informasi :

1. Pedoman teknis perencanaan kinerja;
2. Perencanaan kinerja jangka panjang;
3. Perencanaan kinerja jangka menengah;
4. Perencanaan kinerja jangka pendek;
5. Perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja;
6. Perencanaan anggaran yang mendukung kinerja;

7. Perencanaan kinerja satuan unit organisasi.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang keuangan sub pendapatan daerah.

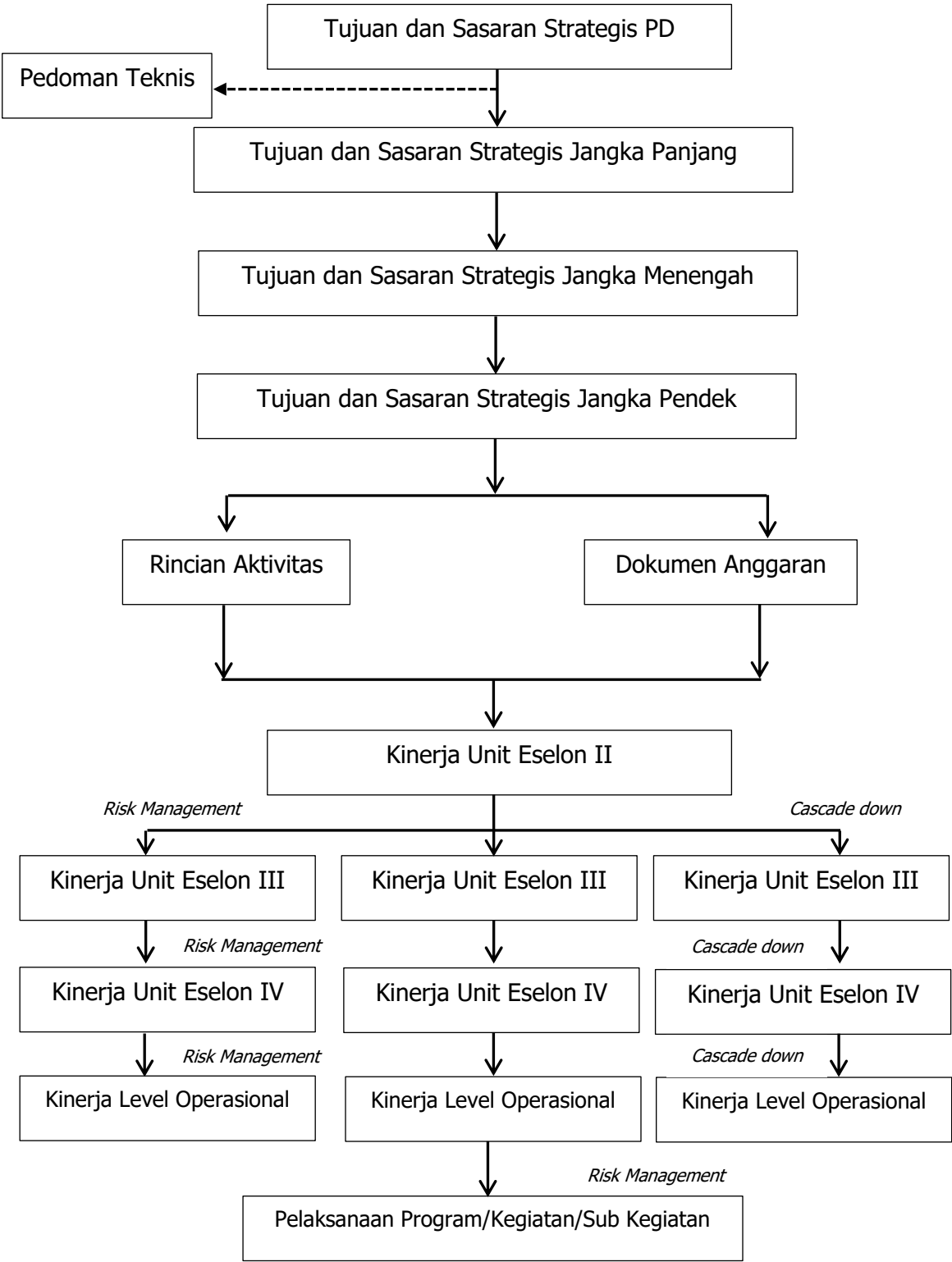
Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi :

- Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijakan teknis serta program kerja;
- Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pemungutan dan pemasukan Pendapatan Daerah;
- Pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, tata usaha, umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;
- Pengkoordinasian yang meliputi segala usaha yang berhubungan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atau petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur serta perundang-undangan yang berlaku;
- Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

B. KERANGKA LOGIS

Kerangka logis dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja ini dimulai dengan perumusan tujuan dan sasaran strategis jangka panjang dalam dokumen perencanaan, penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, mengidentifikasi dan menetapkan Kinerja Unit Eselon II, mengidentifikasi dan menganalisa penjenjangan kinerja (*cascade down*) Unit Kerja Eselon III sampai dengan level operasional staff, mengidentifikasi dan menganalisa Risiko Strategis (RSO) dan Risiko Operasional (ROO) Perangkat Daerah, pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, pelaksanaan dan pemantauan

pengukuran kinerja, Monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja, tindak lanjut pelaksanaan kinerja serta pelaporan kinerja, secara diagram kerangka logis tergambar sebagai berikut :



C. TUJUAN DOKUMEN PERENCANAAN KINERJA

Secara umum tujuan dibuatnya Dokumen Perencanaan Kinerja ini adalah untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pencapaian kinerja serta mendorong peningkatan capaian kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang berorientasi hasil (*outcomes*) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Sementara tujuan khusus yang ingin dicapai melalui Dokumen Perencanaan Kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Memastikan bahwa capaian kinerja setiap jenjang level telah berhasil atau tidak;
2. Menilai tingkat kinerja akuntabilitas setiap level;
3. Memberikan saran dan masukan untuk peningkatan kinerja unit kerja;
4. Sebagai dokumen kendali atas rekomendasi hasil evaluasi pada periode sebelumnya dan memberikan gambaran apa yang akan dicapai dalam jangka menengah.

D. RUANG LINGKUP DOKUMEN PERENCANAAN KINERJA

Dokumen Perencanaan Kinerja ini menjadi basis perencanaan kinerja unit kerja yang meliputi aktivitas perencanaan akuntabilitas kinerja mulai dari perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek termasuk aktivitas dalam penerapan anggaran berbasis kinerja.

Dalam perencanaan kinerja, Dokumen Perencanaan Kinerja ini mencakup ruang lingkup sebagai berikut :

1. Kualitas atas perencanaan kinerja yang selaras dan *cascade down* terhadap tujuan dan sasaran strategis jangka panjang, jangka menengah serta jangka pendek yang *sustainable*;
2. Pengukuran kinerja secara berjenjang pada setiap level unit organisasi dan berkelanjutan menjadikan kebutuhan dalam menyusun strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis unit kerja;
3. Dokumen Perencanaan Kinerja yang menggambarkan atas realistis dapat dicapai dan terukur dengan data kinerja yang relevan, baik keberhasilan/kegagalan dalam mencapai kinerja tahunan, kinerja jangka menengah dan jangka panjang serta upaya/perbaikan yang dilakukan memberikan umpan balik untuk menentukan

strategi/kebijakan yang tepat mencapai kinerja per periode waktu pencapaian;

4. Akuntabilitas kinerja internal mendorong timbulnya impact positif dalam peningkatan kinerja untuk efektivitas dan efisiensi kinerja berkelanjutan bagi Perangkat Daerah;
5. Capaian kinerja pada level output (sub kegiatan) dan level outcomes (program/tujuan/sasaran/tujuan) serta memberikan impact positif untuk kinerja.

E. KUALITAS DOKUMEN PERENCANAAN KINERJA

Rumusan tujuan dan sasaran strategis dalam Dokumen Perencanaan Kinerja :

- a. Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi pembangunan masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dalam 5 (lima) tahun;
- b. Disertai dengan penjelasan yang lebih operasional sehingga mudah dijadikan acuan bagi perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan;
- c. Disertai dengan penjelasan mengapa tujuan dan sasaran strategis tersebut dibutuhkan PD, relevansi tujuan dan sasaran strategis dengan permasalahan dan potensi pembangunan di daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi PD; dan
- d. Sejalan dengan visi dan misi kepala daerah dan arah pembangunan daerah jangka menengah sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMD.
- e. Dapat dibayangkan oleh semua pelaku/pemangku kepentingan pelayanan PD (*imaginable*);
- f. Memiliki nilai yang memang diinginkan dan dicita-citakan (*desirable*);
- g. Memungkinkan, wajar, dan layak untuk dicapai dengan situasi, kondisi, dan kapasitas yang ada (*feasible*);
- h. Memusatkan perhatian kepada isu dan permasalahan utama daerah, sehingga pemerintahan dan pembangunan daerah dapat beroperasi dan terselenggara secara efektif, efisien, dan berkelanjutan serta dapat terjamin eksistensi daerah dimasa depan (*focused*);
- i. Dapat mengantisipasi dan disesuaikan dengan perubahan zaman (*flexible*);
- j. Dapat dikomunikasikan dan mudah dimengerti oleh semua pelaku (*communicable*); dan
- k. Dapat dirumuskan dan ditulis dengan suatu pernyataan yang singkat, jelas, dan padat.

Memenuhi Kriteria SMART yaitu :

- a) *Specific* (spesifik), yakni sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas;
- b) *Measurable* (dapat diukur), yakni target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur;
- c) *Achievable* (dapat dicapai), yakni target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;
- d) *Relevant* (relevan), yakni mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan;
- e) *Time Bound* (batas waktu), yakni periode pencapaian sasaran ditetapkan.



BAB II PERENCANAAN KINERJA



Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan tugas dan fungsinya, telah merumuskan Dokumen Perencanaan Kinerja yang menjadi acuan dalam menyusun perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dalam bentuk Dokumen Perencanaan Kinerja yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan dan pemantauan serta pengukuran kinerja Perangkat Daerah. Pokok-pokok pikiran dalam Dokumen Perencanaan Kinerja mencakup tujuan dan sasaran strategis serta cara mencapai tujuan dan sasaran strategis akan diuraikan dalam bab ini.

Penetapan tujuan dan sasaran strategis penyelenggaraan Badan Pendapatan Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian organisasi dalam mendukung tujuan dan sasaran Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada dokumen Dokumen Perencanaan Kinerja.

Mendasari tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Perencanaan Kinerja, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran strategis pelayanan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek Badan Pendapatan Daerah. Rumusan tujuan dan sasaran strategis merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategis pencapaian kinerja. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dokumen Perencanaan Kinerja dengan menjawab isu strategis, tantangan dan peluang sektor pendapatan dan permasalahan yang ada. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing unit kerja, dapat dicapai, terukur, realistis dan menantang melalui salah tujuan Badan Pendapatan Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan. Tujuan Badan Pendapatan Daerah adalah “Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi”

Indikator pada Tujuan yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Tujuan Badan Pendapatan Daerah disusun sebagai indikator kinerja outcomes dan bukan

merupakan indikator kinerja output. Indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut yaitu Indeks realisasi pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 mencapai nilai indeks 0,412.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang harus memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bound* (SMART) dengan hubungan kausal *logical framework* serta *critical success factor (CSF)*, maka sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dan penetapan sasaran akan lebih mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien.

Sasaran strategis pendapatan daerah merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu kinerja outcome/impact dari beberapa program nomenklatur, kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, sasaran strategis dirumuskan dari sasaran pendapatan dalam Dokumen Perencanaan Kinerja dan memperhatikan permasalahan (*strategic issue*) dan capaian pendapatan daerah serta menjabarkan tujuan dan sasaran strategis dalam Dokumen Perencanaan Kinerja. Dengan berlandaskan pada isu strategis dimaksud dan capaian/kesinambungan terhadap Dokumen Perencanaan Kinerja Badan Pendapatan Daerah serta dinamika perkembangan perekonomian baik dalam skala regional maupun nasional, maka penyusunan sasaran strategis berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) nya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Sasaran Strategis 1 (SS.1) : Meningkatnya pendapatan daerah

Untuk mewujudkan tujuan :

1. meningkatnya penerimaan sektor pajak daerah;
2. menurunnya tindak penyimpangan pada pengelolaan pendapatan daerah;
3. meningkatnya penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain;
4. meningkatnya standart layanan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Sasaran Strategis 2 (SS.2) : Meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Untuk mewujudkan tujuan :

1. meningkatnya potensi penerimaan yang digali menjadi sumber pendapatan;

Sasaran Strategis 3 (SS.3) : Meningkatkan Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal

Untuk mewujudkan tujuan :

1. agar daerah lebih kreatif dan inovasi dalam menggali potensi-potensi sumber daya yang ada menjadi kekuatan pendapatan asli daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan;
2. mengurangi ketergantungan dana transfer pusat sebagai sumber pendapatan daerah;

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Dokumen Perencanaan Kinerja Badan Pendapatan Daerah disusun sebagai indikator kinerja outcome dan bukan merupakan indikator kinerja output, yang dijabarkan menjadi 3 (tiga) sasaran strategis dengan menggunakan pendekatan metode *Balanced Score Card* (BSC) yang dibagi dalam 4 (empat) perspektif yaitu *stakeholder perspective*, *costumer perspective*, *internal process perspective* and *learning and growth perspective*, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Stakeholders Perspective

Mencakup SS.1 dengan Indikator Kinerja Utama :

- IKSS 1 Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2. Customer Perspective

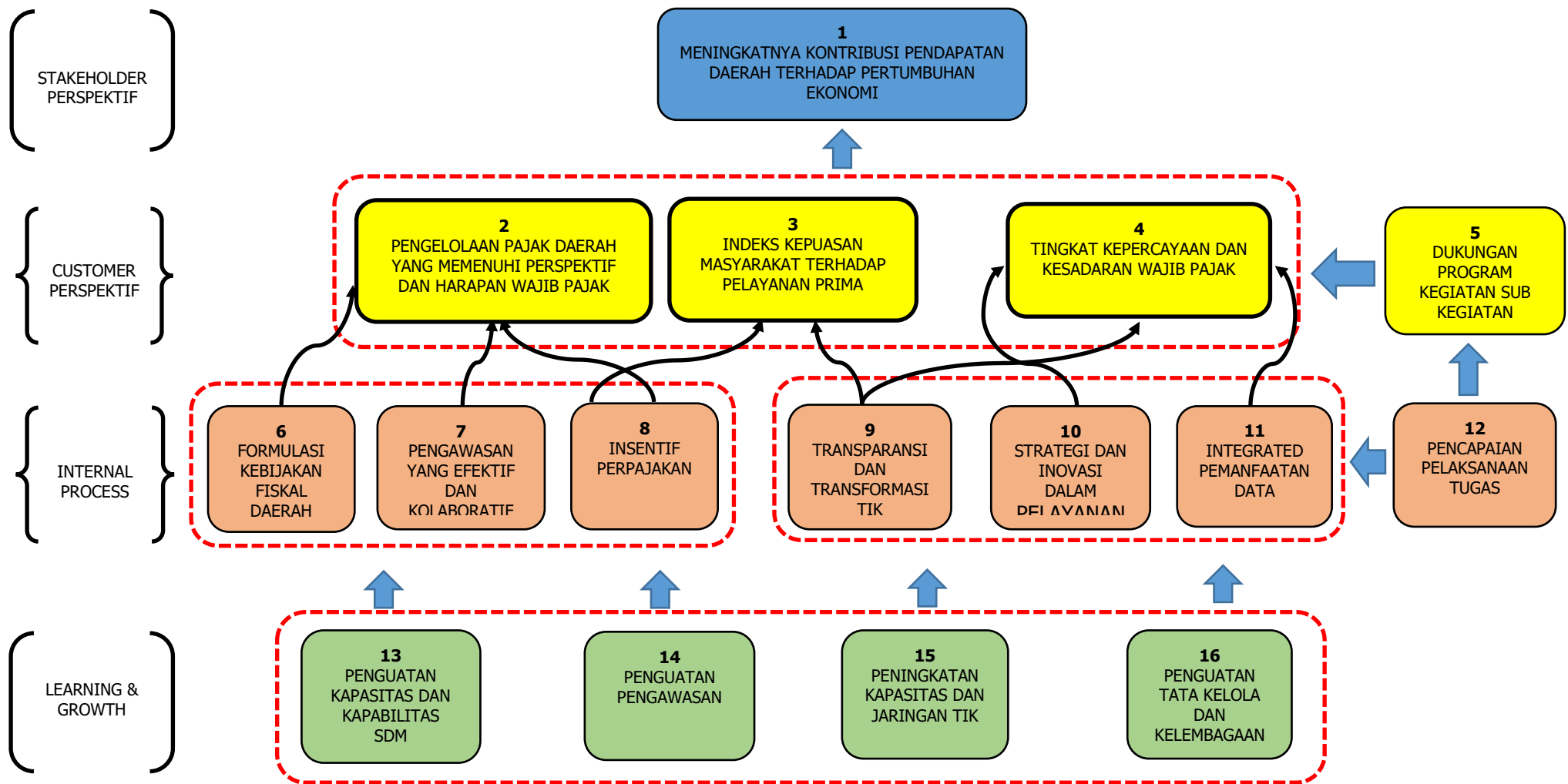
Mencakup SS.2 dengan Indikator Kinerja Utama :

- IKSS 2 Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas;
- IKSS 3 Rasio Pendapatan Daerah Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah.

3. Internal Process Perspektive and Learning and Growth Perspektive

Mencakup SS.3 dengan Indikator Kinerja Utama :

- IKSS 4 Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi

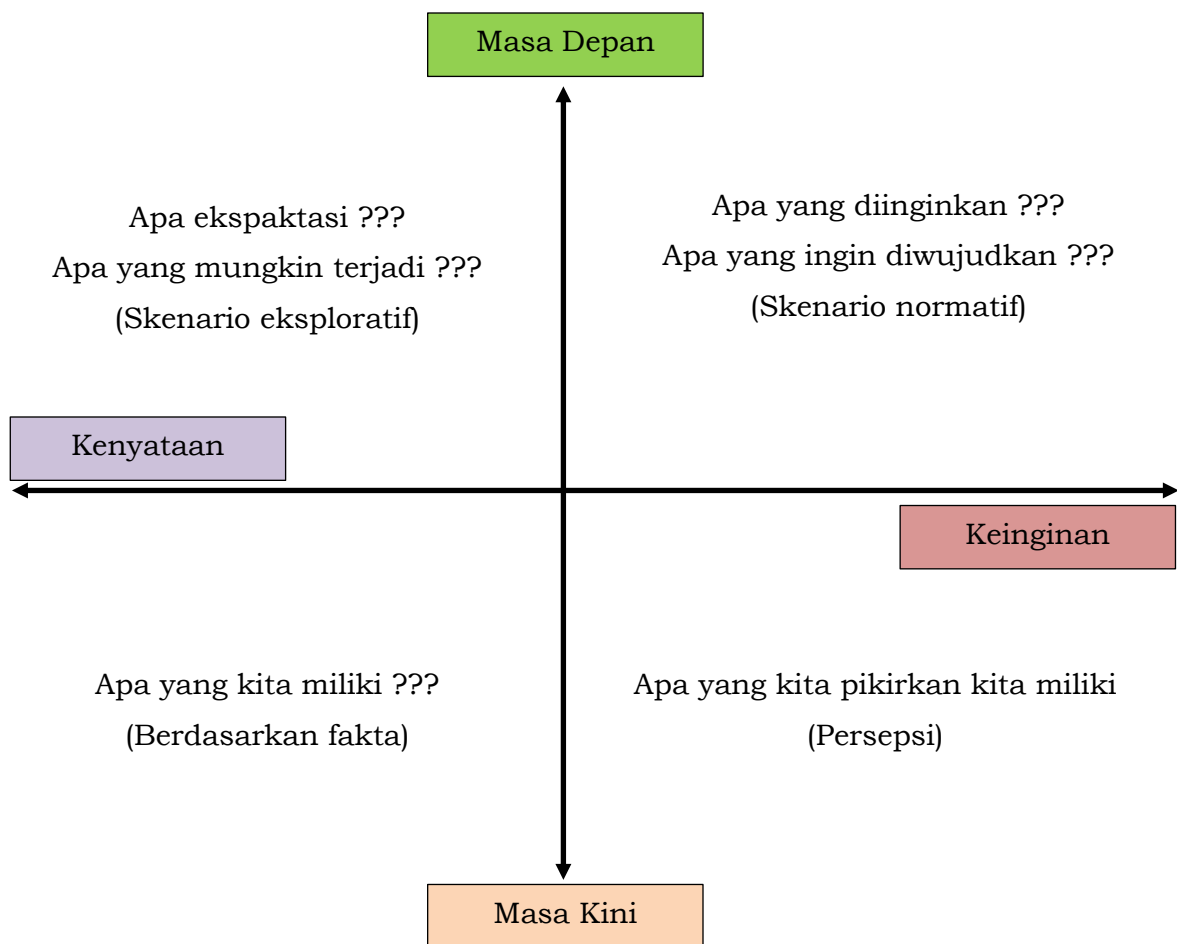


Dokumen Perencanaan Kinerja jangka panjang perlu dilakukan analisis yang melihat pandangan ke depan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah ke depan, analisa *foresight* dapat membantu memberikan gambaran masa depan Bapenda sebagai OPD yang mengelola pendapatan daerah dengan tingkat sensitivitas terhadap faktor internal dan eksternal.

Adapun tujuan dan manfaat dalam analisa *foresight* sebagai berikut :

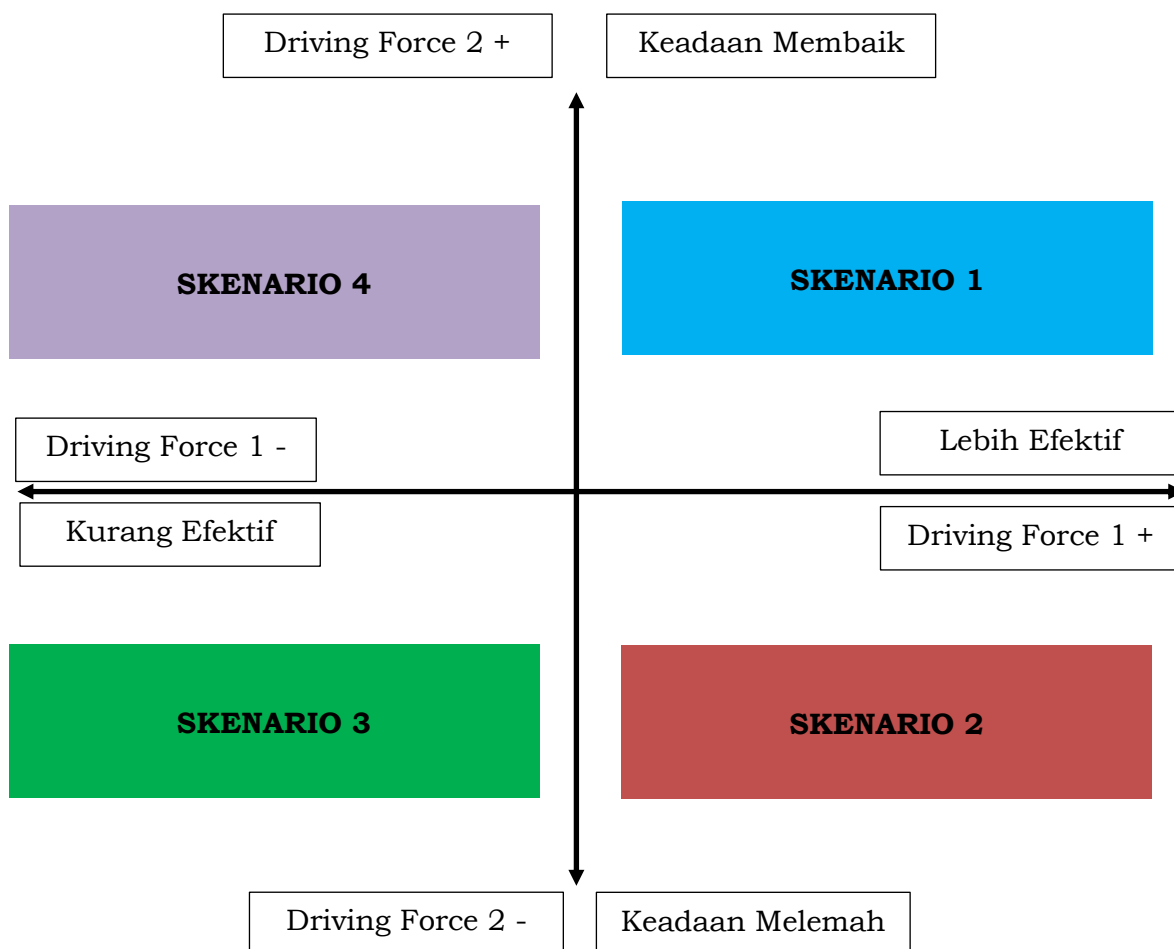
1. Menumbuhkan kepercayaan bagi institusi, *foresight* dapat membantu menumbuhkan kepercayaan diri bagi Bapenda dalam membuat kebijakan dan strategi pengelolaan pendapatan daerah yang lebih optimal;
2. Memberikan alternatif kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah daerah, sehingga sinergi dan kolaborasi antar stakeholder terwujud untuk pengelolaan pendapatan daerah yang transparansi di era transformasi digital;
3. *Foresight* memfasilitasi pembuatan kebijakan dalam ketidakpastian yang tinggi, hal ini salah satu yang digunakan untuk mengidentifikasi dampak risiko dalam jangka panjang dari kebijakan yang diambil;
4. *Foresight* memberikan evaluasi dari suatu kebijakan yang diambil terhadap program kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan yang direncanakan dan dilaksanakan.

Metode analisis *foresight* dengan melihat kondisi "Masa Kini dan Masa Depan" serta "Keinginan dan Kenyataan" seperti pada gambar berikut :



Gambar

Analisis Foresight



Gambar

Skenario Foresight

Dari skema gambar tersebut diatas, terbentuk 4 (empat) kuadran yang menggambarkan kondisi “respons pemerintah daerah terhadap kebijakan Undang-undang di Bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah” yang mewakili aspek-aspek pengambilan kebijakan dan tingkat kolaborasi dalam situasi pemulihan ekonomi dan penetrasi inflasi daerah. Respons pemerintah daerah ini membentuk sumbu horizontal yaitu [1]. Lebih efektif dan [2]. Kurang efektif. Kemudian 5 (lima) faktor yang mewakili respon pemerintah daerah yaitu :

1. Kebijakan Kapasitas Fiskal Daerah;
2. Program Pemerintah Daerah yang memastikan Penerimaan Pendapatan Daerah tercapai atau melampaui target;
3. Kebijakan Pengendalian Inflasi;
4. Kerjasama antar institusi (*cross cutting*) dengan Bapenda termasuk Pemerintah Pusat;
5. Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan swasta.

Sementara sumbu vertikal membentuk “tingkat kondisi perekonomian Sumatera Selatan” yaitu [1]. Keadaan membaik; [2]. Keadaan melemah. Empat faktor yang dapat mewakili “tingkat kondisi perekonomian Sumatera Selatan yaitu sebagai berikut :

1. Daya saing daerah;
2. Harga komoditas relatif stabil;
3. Laju inflasi terkendali;
4. Pendapatan income perkapita.

Berikut disajikan tabel hasil analisis *foresight* sebagai gambaran untuk mengeliminasi “ketidakpastian” utama yang mungkin bisa menjadi hambatan dalam pencapaian tugas dan fungsi Bapenda Prov. Sumsel :

Tabel

Analisis Faktor Pembentuk Dua Ketidakpastian Utama

Tujuan	:	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Sasaran Strategis	:	1. Meningkatkan pendapatan daerah
		2. Meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
		3. Meningkatkan kemandirian daerah dalam pembangunan yang bersumber pada pendanaan pendapatan asli daerah
Respons Pemerintah Daerah terhadap kebijakan Undang-undang Perpajakan dan Retribusi		
Kurang Efektif (<i>do nothing</i>)		Lebih Efektif (<i>do something</i>)
1.	Kebijakan kapasitas fiskal daerah kurang bisa merespon	1. Kebijakan kapasitas fiskal daerah lebih cepat merespon
2.	Program kegiatan sub kegiatan kurang adaftif	2. Program kegiatan sub kegiatan lebih adaftif
3.	Kebijakan pengendalian inflasi kurang efektif	3. Kebijakan pengendalian inflasi lebih efektif
4.	Kerjasama antar institusi (<i>cross cutting</i>) kurang efektif	4. Kerjasama antar institusi (<i>cross cutting</i>) lebih efektif
5.	Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan swasta kurang efektif	5. Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan swasta lebih efektif
Tingkat kondisi perekonomian Sumatera Selatan		
Keadaan Melemah (<i>do nothing</i>)		Keadaan Membaik (<i>do something</i>)
1.	Daya saing daerah yang rendah	1. Daya saing daerah yang membaik
2.	Harga komoditas unggulan Sumatera Selatan tidak terkendali	2. Harga komoditas unggulan Sumatera Selatan relative stabil
3.	Laju inflasi daerah masih tinggi	3. Laju inflasi daerah yang terkendali
4.	Pendapatan income per kapita masih rendah	4. Pendapatan income per kapita membaik

Terhadap empat skenario yang dihasilkan pada sumbu vertikal dan horizontal telah digambarkan sebagaimana pada gambar merupakan prediksi gambaran yang akan pada Bapenda selama kurun waktu periode jangka panjang. Setiap skenario memberikan gambaran pada Bapenda di masa mendatang pada sektor sebagai berikut : [1]. Kapasitas SDM; [2]. Produktivitas Aset; [3]. Kelembagaan; [4]. Pertumbuhan Pendapatan Daerah; [5]. Potensi Retribusi Yang Digali, maka disimpulkan ada 4 (empat) skenario dengan implikasinya sebagai berikut :

- 1. Skenario 1 (kuadran I) kondisinya adalah Respon Pemerintah Daerah lebih efektif dan perekonomian Sumatera Selatan membaik (diatas 6,24)

Tabel
Hasil Analisa Skenario 1 Foresight

Kondisi Bapenda di Masa Depan			
Gambaran Bapenda dari sisi Sektor Kapasitas SDM, Produktivitas Aset, Kelembagaan, Pertumbuhan Pendapatan Daerah dan Potensi Retribusi Yang Digali			
SKENARIO 1 : Respon Pemerintah Daerah lebih efektif dan perekonomian Sumatera Selatan membaik (diatas 6,24)			
1.	Kapasitas SDM	a.	Analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai samsat minimal 60 % terpenuhi
		b.	Kompetensi PPNS di Bidang Pajak minimal 50 % terpenuhi
		c.	Adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja juru sita minimal 30 % terpenuhi
		d.	Adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja auditor pajak minimal 25 % terpenuhi
		e.	Adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja penyuluh pajak minimal 70 % terpenuhi
		f.	Peningkatan kompetensi otoritas pajak minimal 40 % terpenuhi
2.	Produktivitas Aset	a.	Minimal 86 % Bapenda memiliki kantor samsat yang menjadi asset Pemerintah Provinsi
		b.	Dari 86 % kantor samsat yang akan dikuasai oleh Pemerintah Provinsi, minimal 25 % nya telah memiliki kerjasama pemanfaatan asset dengan pihak ketiga untuk menambah income pendapatan
3.	Kelembagaan	a.	Penambahan titik layanan pembayaran pajak terutama di daerah pedalaman alur sungai (<i>captive area</i>)
		b.	Penambahan titik layanan pembayaran pajak untuk antisipasi rencana penagihan kapal – kapal besar diatas 7 GT
		c.	Penambahan kantor layanan samsat
		d.	Terbentuknya otoritas pengadilan pajak di Sumatera Selatan
4.	Pertumbuhan Pendapatan Daerah	a.	Pertumbuhan pendapatan daerah pada asumsi optimis diatas 8,33 %
5.	Potensi Retribusi Yang Digali	a.	Kerjasama dengan OPD terkait meningkat terkait dengan terobosan inovasi dalam menggali sumber – sumber retribusi baru
		b.	Kerjasama pemanfaatan asset Pemerintah Provinsi dengan pihak ketiga
		c.	Pemanfaatan platform digitalisasi

2. Skenario 2 (kuadran II) kondisinya adalah Respon Pemerintah Daerah lebih efektif dan perekonomian Sumatera Selatan melemah (4,89 – 5,02)

Tabel
Hasil Analisa Skenario 2 Foresight

Kondisi Bapenda di Masa Depan			
Gambaran Bapenda dari sisi Sektor Kapasitas SDM, Produktivitas Aset, Kelembagaan, Pertumbuhan Pendapatan Daerah dan Potensi Retribusi Yang Digali			
SKENARIO 2 : Respon Pemerintah Daerah lebih efektif dan perekonomian Sumatera Selatan melemah (range 4,89 – 5,02)			
1.	Kapasitas SDM	a.	Analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai samsat minimal 60 % terpenuhi
		b.	Kompetensi PPNS di Bidang Pajak minimal 50 % terpenuhi
		c.	Adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja juru sita minimal 30 % terpenuhi
		d.	Adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja auditor pajak minimal 25 % terpenuhi
		e.	Adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja penyuluh pajak minimal 70 % terpenuhi
		f.	Peningkatan kompetensi otoritas pajak minimal 40 % terpenuhi
2.	Produktivitas Aset	a.	Minimal 51 % Bapenda memiliki kantor samsat yang menjadi asset Pemerintah Provinsi
		b.	Dari 51 % kantor samsat yang akan dikuasai oleh Pemerintah Provinsi, minimal 10 % nya telah memiliki kerjasama pemanfaatan asset dengan pihak ketiga untuk menambah income pendapatan
3.	Kelembagaan	a.	Penambahan titik layanan pembayaran pajak terutama di daerah pedalaman alur sungai (<i>captive area</i>)
		b.	Penambahan titik layanan pembayaran pajak untuk antisipasi rencana penagihan kapal – kapal besar diatas 7 GT
4.	Pertumbuhan Pendapatan Daerah	a.	Pertumbuhan pendapatan daerah pada asumsi pesimis range 2,33 – 2,50 %
5.	Potensi Retribusi Yang Digali	a.	Jenis retribusi hanya berdasarkan apa yang sudah di tetapkan oleh kebijakan nasional
		b.	Sebagian kecil kerjasama pemanfaatan asset Pemerintah Provinsi dengan pihak ketiga
		c.	Belum dilakukan pemanfaatan platform digitalisasi

3. Skenario 3 (kuadran III) kondisinya adalah Respon Pemerintah Daerah kurang efektif dan perekonomian Sumatera Selatan melemah (4,89 – 5,02)

Tabel
Hasil Analisa Skenario 3 Foresight

Kondisi Bapenda di Masa Depan			
Gambaran Bapenda dari sisi Sektor Kapasitas SDM, Produktivitas Aset, Kelembagaan, Pertumbuhan Pendapatan Daerah dan Potensi Retribusi Yang Digali			
SKENARIO 3 : Respon Pemerintah Daerah kurang efektif dan perekonomian Sumatera Selatan melemah (range 4,89 – 5,02)			
1.	Kapasitas SDM	a.	Tidak ada penambahan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai samsat minimal 60 % terpenuhi
		b.	Tidak ada kompetensi PPNS di Bidang Pajak minimal 50 % terpenuhi
		c.	Tidak adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja juru sita minimal 30 % terpenuhi
		d.	Tidak adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja auditor pajak minimal 25 % terpenuhi
		e.	Tidak adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja penyuluh pajak minimal 70 % terpenuhi
		f.	Tidak terpenuhinya kompetensi otoritas pajak minimal 40 % terpenuhi
2.	Produktivitas Aset	a.	Minimal 51 % Bapenda memiliki kantor samsat yang menjadi asset Pemerintah Provinsi
		b.	Dari 51 % kantor samsat yang akan dikuasai oleh Pemerintah Provinsi, minimal 10 % nya telah memiliki kerjasama pemanfaatan asset dengan pihak ketiga untuk menambah income pendapatan
3.	Kelembagaan	a.	Penambahan titik layanan pembayaran pajak terutama di daerah pedalaman alur sungai (<i>captive area</i>)
		b.	Penambahan titik layanan pembayaran pajak untuk antisipasi rencana penagihan kapal – kapal besar diatas 7 GT
		c.	Tidak terbentuknya Pengadilan Pajak di Wilayah Sumatera Selatan
4.	Pertumbuhan Pendapatan Daerah	a.	Pertumbuhan pendapatan daerah pada asumsi pesimis range 2,33 – 2,50 %
5.	Potensi Retribusi Yang Digali	a.	Jenis retribusi hanya berdasarkan apa yang sudah di tetapkan oleh kebijakan nasional
		b.	Sebagian kecil kerjasama pemanfaatan asset Pemerintah Provinsi dengan pihak ketiga
		c.	Belum dilakukan pemanfaatan platform digitalisasi

4. Skenario 4 (kuadran IV) kondisinya adalah Respon Pemerintah Daerah kurang efektif dan perekonomian Sumatera Selatan membaik (didas 6,24)

Tabel
Hasil Analisa Skenario 4 Foresight

Kondisi Bapenda di Masa Depan			
Gambaran Bapenda dari sisi Sektor Kapasitas SDM, Produktivitas Aset, Kelembagaan, Pertumbuhan Pendapatan Daerah dan Potensi Retribusi Yang Digali			
SKENARIO 4 : Respon Pemerintah Daerah kurang efektif dan perekonomian Sumatera Selatan membaik (diatas 6,24)			
1.	Kapasitas SDM	a.	Tidak ada penambahan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai samsat minimal 60 % terpenuhi
		b.	Tidak ada kompetensi PPNS di Bidang Pajak minimal 50 % terpenuhi
		c.	Tidak adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja juru sita minimal 30 % terpenuhi
		d.	Tidak adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja auditor pajak minimal 25 % terpenuhi
		e.	Tidak adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja penyuluh pajak minimal 70 % terpenuhi
		f.	Tidak terpenuhinya kompetensi otoritas pajak minimal 40 % terpenuhi
2.	Produktivitas Aset	a.	Minimal 51 % Bapenda memiliki kantor samsat yang menjadi asset Pemerintah Provinsi
		b.	Dari 51 % kantor samsat yang akan dikuasai oleh Pemerintah Provinsi, minimal 15 % nya telah memiliki kerjasama pemanfaatan asset dengan pihak ketiga untuk menambah income pendapatan
3.	Kelembagaan	a.	Penambahan titik layanan pembayaran pajak terutama di daerah pedalaman alur sungai (<i>captive area</i>)
		b.	Penambahan titik layanan pembayaran pajak untuk antisipasi rencana penagihan kapal – kapal besar diatas 7 GT
		c.	Terbentuknya Pengadilan Pajak di Wilayah Sumatera Selatan
4.	Pertumbuhan Pendapatan Daerah	a.	Pertumbuhan pendapatan daerah pada asumsi optimis diatas 6,24 %
5.	Potensi Retribusi Yang Digali	a.	Kerjasama dengan OPD terkait meningkat terkait dengan terobosan inovasi dalam menggali sumber – sumber retribusi baru
		b.	Sebagian besar kerjasama pemanfaatan asset Pemerintah Provinsi dengan pihak ketiga
		c.	Mulai diberlakukannya pemanfaatan platform digitalisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 74 Tahun 2016 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Keuangan Sub Pendapatan Daerah. Dokumen Perencanaan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjadi acuan dan pedoman teknis perencanaan kinerja Bapenda Provinsi Sumatera Selatan dalam menyelenggarakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi selama periode jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Tujuan dan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja Jangka Panjang

1. Unit Eselon II Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon II Perangkat Daerah				TARGET AKHIR
			2013 - 2018	2019 - 2023	2024 - 2029	2030 - 2035	
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	91,92 %	92,02 %	92,21 %	100 %	100 %
2.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi	1,818	2,00	6,00	8,00	8,00
3.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	0,88	0,92	1,18	1,23	1,23
		Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	0,91	0,95	0,98	1,13	1,13

2. Bidang Pajak

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff				TARGET AKHIR
			2013 - 2018	2019 - 2023	2024 - 2029	2030 - 2035	
1.	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Target Terhadap GDP	0,92 %	1,2 %	1,73 %	1,92 %	1,62 %
2.	Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	11,36 %	13,11 %	14,81 %	15,45 %	15,45 %
3.	Berkurangnya Doleansi Pajak Daerah	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak	8 %	6 %	5,02 %	4,16 %	4,16 %
4.	Berkurangnya Kesalahan Dalam Ikhtisar Pembukuan Pajak Daerah	Persentase meningkatnya ketelitian ikhtisar pembukuan pajak	88 %	100 %	100 %	100 %	100 %

3. Bidang Pendapatan Lain – Lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff				TARGET AKHIR
			2013 - 2018	2019 - 2023	2024 - 2029	2030 - 2035	
1.	Meningkatnya Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain Dalam APBD	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	87,45 %	90,56 %	95,43 %	100 %	100 %
2.	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Retribusi Terhadap Target	84 %	87 %	89,78 %	92 %	92 %
3.	Meningkatnya Pendapatan dari Penerimaan Bagi Hasil	Persentase Meningkatnya Penerimaan Bagi Hasil	78 %	82 %	83,93 %	87 %	87 %
4.	Meningkatnya Penerimaan dari Hibah	Persentase Meningkatnya Penerimaan Hibah	74 %	79 %	84,83 %	86 %	86 %

4. Bidang Pengawasan dan Pembinaan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff				TARGET AKHIR
			2013 - 2018	2019 - 2023	2024 - 2029	2030 - 2035	
1.	Meningkatnya Level Maturitas Pengendalian Intern Pengawasan Pendapatan Daerah	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2.	Meningkatnya Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Intensitas Pemeriksaan	92,98 %	92,90 %	92,91 %	100 %	100 %
3.	Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian atas Temuan Penyimpangan Pelanggaran Dalam Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian	21 %	18 %	16,85 %	12 %	12 %
4.	Berkurangnya Tindakan Represif untuk Penertiban Keamanan dalam Pelaksanaan Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindakan Refresif	16,24 %	13,24 %	12,74 %	10,21 %	10,21 %

5. Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff				TARGET AKHIR
			2013 - 2018	2019 - 2023	2024 - 2029	2030 - 2035	
1.	Meningkatnya Penggalan Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	75 %	80 %	82,19 %	87 %	87 %
2.	Meningkatnya Objek Penelitian Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Penelitian Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah	79 %	83 %	83,81 %	90 %	90 %
3.	Meningkatnya Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Persentase Meningkatnya Kerjasama	88 %	93 %	93,62 %	96 %	96 %
4.	Deregulasi Kebijakan Dalam Penetapan Sumber Potensi	Persentase Meningkatnya Peraturan yang Diharmonisasi	92 %	100 %	100 %	100 %	100 %

6. Sekretariat

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff				TARGET AKHIR
			2013 - 2018	2019 - 2023	2024 - 2029	2030 - 2035	
1.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah						
		Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan	94 %	94,17 %	94,96 %	100 %	100 %
		Persentase Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran	6,53 %	4,53 %	4,92 %	3,82 %	3,82 %
		Persentase Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	73 %	80 %	80,92 %	85 %	85 %

7. UPTB Pusat Informasi dan Aplikasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff				TARGET AKHIR
			2013 - 2018	2019 - 2023	2024 - 2029	2030 - 2035	
1.	Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	61,,22 %	61,60 %	62,67 %	61,88 %	61,88 %
2.	Meningkatnya Kerjasama Layanan Pada e commerce	Persentase Meningkatnya Kerjasama	89,17 %	90 %	91,54 %	100 %	100 %
3.	Meningkatnya Digitalisasi Pembayaran Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Penggunaan Digitalisasi	74 %	78 %	79,21 %	83 %	83 %
4.	Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	Persentase Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	40,15 %	40,53 %	41,78 %	42,42 %	42,42 %
5.	Meningkatnya Kecepatan Internet	Kecepatan Layanan Internet up to 100 MBPs	50 Mbps	100 MBPs	100 MBPs	100 MBPs	100 MBPs

8. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff				TARGET AKHIR
			2013 - 2018	2019 - 2023	2024 - 2029	2030 - 2035	
1.	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Terhadap Target	92,18 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Berkurangnya Tunggalan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Tunggalan Pajak	13,48 %	10,53 %	8,62 %	8,35 %	8,35 %
3.	Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	12,08 %	9,83 %	9,60 %	7,85 %	7,85 %

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

TUJUAN RPJPD : Sumatera Selatan Unggul Terdepan				
Penjelasan Visi sebagai berikut :				
1.	Keadaan dimana terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan dan pembangunan maritime yang merata dan berkeadilan, dimana hasil – hasil pembangunan dinikmati seluruh anggota masyarakat			
2.	Kondisi dimana meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang menjunjung tinggi nilai –nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, integritas dan kearifan lokal, disamping terpenuhinya hak – hak dasar masyarakat dengan dukungan anggaran pro rakyat, pro lingkungan dan pro gender yang transparan dan akuntabel			
3.	Kondisi tercapainya pelayanan public yang baik dengan dukungan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN), serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak			
4.	Terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi kehidupan masyarakat sehingga anggota masyarakat dapat menjalankan aktivitas keagamaan, terciptanya kehidupan masyarakat yang menghargai perbedaan dan masyarakat dapat menikmati kesenian yang bermutu di pusat pusat kebudayaan			
MISI III RPJPD : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.				
Tujuan OPD	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan	1. Meningkatnya Pendapatan Daerah	1. Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Meningkatkan penerimaan sektor pajak daerah 2. Menurunkan tindak penyimpangan pada pengelolaan pendapatan daerah; 3. Meningkatkan penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain; 4. Meningkatkan standart layanan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah : a. Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah b. Analisis Investasi Pemerintah Daerah c. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah d. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan

Ekonomi			5. Pengawasan Internal Yang Baik 6. Meningkatnya kemampuan (ability) atau kapasitas personil pengawasan 7. Meningkatnya Penerapan Prosedur Pelayanan yang baik	- Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah e. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah f. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah g. Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi h. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan i. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak j. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi 3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah : a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah; b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah; d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah; e. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah; f. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; g. Penetapan Wajib Pajak Daerah; h. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah; i. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah; j. Penagihan Pajak Daerah; k. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah; l. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah; m. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
---------	--	--	--	--

				n. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
	2. Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	2. Rasio PAD Terhadap PDRB ADHB Non Migas	1. Meningkatnya Potensi Penerimaan yang Digali Menjadi Sumber Pendapatan; 2. Meningkatnya Objek Yang Menjadi Sumber Pendapatan; 3. Optimalisasi Pemanfaatan Aset Yang Dapat Dikerjasamakan; 4. Meningkatnya Kerjasama yang dilakukan dengan pihak ketiga; 5. Meningkatnya Sinergitas dengan Mitra Kerja; 6. Meningkatnya koordinasi yang dilakukan bersama mitra pengelolaan pendapatan daerah.	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah : a. Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah b. Analisis Investasi Pemerintah Daerah c. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah d. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah e. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah f. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah g. Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi h. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan i. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak j. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi 3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah : a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah; b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah; d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah; e. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;

				f. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; g. Penetapan Wajib Pajak Daerah; h. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah; i. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah; j. Penagihan Pajak Daerah; k. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah; l. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah; m. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; n. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
		3. Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	1. Meningkatnya Potensi Penerimaan yang Digali Menjadi Sumber Pendapatan; 2. Meningkatnya Objek Yang Menjadi Sumber Pendapatan; 3. Optimalisasi Pemanfaatan Aset Yang Dapat Dikerjasamakan; 4. Meningkatnya Kerjasama yang dilakukan dengan pihak ketiga; 5. Meningkatnya Sinergitas dengan Mitra Kerja; 6. Meningkatnya koordinasi yang dilakukan bersama mitra pengelolaan pendapatan daerah.	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah : a. Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah b. Analisis Investasi Pemerintah Daerah c. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah d. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah e. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah f. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah g. Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi h. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan i. Pengelolaan Dana Darurat dan

				Mendesak j. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi 3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah : a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah; b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah; d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah; e. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah; f. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; g. Penetapan Wajib Pajak Daerah; h. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah; i. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah; j. Penagihan Pajak Daerah; k. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah; l. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah; m. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; n. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
	3. Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan	4. Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran	1. Berkurangnya angka koreksi PAD Terhadap Belanja APBD yang pendanaannya bersumber pada PAD;	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah :

	Pendapatan Dari Perencanaan Awal	PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi	2. Meningkatnya Potensi Penerimaan yang Digali Menjadi Sumber Pendapatan; 3. Meningkatnya Objek Yang Menjadi Sumber Pendapatan; 4. Optimalisasi Pemanfaatan Aset Yang Dapat Dikerjasamakan; 5. Meningkatnya Kerjasama yang dilakukan dengan pihak ketiga; 6. Meningkatnya Sinergitas dengan Mitra Kerja; 7. Meningkatnya koordinasi yang dilakukan bersama mitra pengelolaan pendapatan daerah.	a. Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah b. Analisis Investasi Pemerintah Daerah c. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah d. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah e. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah f. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah g. Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi h. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan i. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak j. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi 3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah : a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah; b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
--	-------------------------------------	---	--	--

				d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah; e. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah; f. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; g. Penetapan Wajib Pajak Daerah; h. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah; i. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah; j. Penagihan Pajak Daerah; k. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah; l. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah; m. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; n. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
--	--	--	--	--



BAB III KESINAMBUNGAN PERENCANAAN KINERJA

A. Kebutuhan Anggaran

Program/kegiatan/sub kegiatan merupakan bentuk alat/proses dari instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pembangunan Daerah. Sementara kegiatan merupakan bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang dijabarkan dalam Dokumen Perencanaan Kinerja ini sebagai bentuk strategi dan arah kebijakan serta dijalankan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dalam sistem perencanaan dan keuangan daerah.

Berikut disajikan tabel rencana kebutuhan anggaran yang mendukung target dan capaian kinerja sebagai berikut :

A. Anggaran yang Mendukung Kinerja

1. Unit Eselon II Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon II Perangkat Daerah				TARGET AKHIR
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		2013 - 2018	2019 - 2023	2024 - 2029	2030 - 2035	
		Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. 165 M	Rp. 265 M	Rp. 272 M	Rp. 280 M	Rp. 280 M
2.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi	Rp. 5 M	Rp. 14 M	Rp. 16,5 M	Rp. 17,2 M	Rp. 17,2 M
3.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	Rp. 500 Juta	Rp. 1,2 M	Rp. 1,8 M	Rp. 2,3 M	Rp. 2,3 M
		Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	Rp. 500 Juta	Rp. 1,2 M	Rp. 1,8 M	Rp. 2,3 M	Rp. 2,3 M

2. Bidang Pajak

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff				TARGET AKHIR
			2013 - 2018	2019 - 2023	2024 - 2029	2030 - 2035	
1.	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Target Terhadap GDP	Rp. 3 M	Rp. 4,8 M	Rp. 5,5 M	Rp. 6 M	Rp. 6 M
2.	Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Rp. 2,7 M	Rp. 3,6 M	Rp. 4,2 M	Rp. 5 M	Rp. 5 M
3.	Berkurangnya Doleansi Pajak Daerah	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak	Rp. 800 Juta	Rp. 1,1 M	Rp. 1,5 M	Rp. 2 M	Rp. 2 M
4.	Berkurangnya Kesalahan Dalam Ikhtisar Pembukuan Pajak Daerah	Persentase meningkatnya ketelitian ikhtisar pembukuan pajak	Rp. 100 Juta	Rp. 100 Juta	Rp. 250 Juta	Rp. 500 Juta	Rp. 500 Juta

3. Bidang Pendapatan Lain – Lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff				TARGET AKHIR
			2013 - 2018	2019 - 2023	2024 - 2029	2030 - 2035	
1.	Meningkatnya Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain Dalam APBD	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	Rp. 300 Juta	Rp. 460 Juta	Rp. 720 Juta	Rp. 1 M	Rp. 1 M
2.	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Retribusi Terhadap Target	Rp. 100 Juta	Rp. 125 Juta	Rp. 400 Juta	Rp. 650 Juta	Rp. 650 Juta
3.	Meningkatnya Pendapatan dari Penerimaan Bagi Hasil	Persentase Meningkatnya Penerimaan Bagi Hasil	Rp. 100 Juta	Rp. 200 Juta	Rp. 350 Juta	Rp. 500 Juta	Rp. 500 Juta
4.	Meningkatnya Penerimaan dari Hibah	Persentase Meningkatnya Penerimaan Hibah	Rp. 100 Juta	Rp. 135 Juta	Rp. 400 Juta	Rp. 700 Juta	Rp. 700 Juta

4. Bidang Pengawasan dan Pembinaan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff				TARGET AKHIR
			2013 - 2018	2019 - 2023	2024 - 2029	2030 - 2035	
1.	Meningkatnya Level Maturitas Pengendalian Intern Pengawasan Pendapatan Daerah	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	Rp. 200 Juta	Rp. 300 Juta	Rp. 500 Juta	Rp. 750 Juta	Rp. 750 Juta
2.	Meningkatnya Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Intensitas Pemeriksaan	Rp. 200 Juta	Rp. 300 Juta	Rp. 500 Juta	Rp. 750 Juta	Rp. 750 Juta
3.	Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian atas Temuan Penyimpangan Pelanggaran Dalam Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian	Rp. 200 Juta	Rp. 300 Juta	Rp. 500 Juta	Rp. 750 Juta	Rp. 750 Juta
4.	Berkurangnya Tindakan Represif untuk Penertiban Keamanan dalam Pelaksanaan Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindakan Refresif	Rp. 200 Juta	Rp. 300 Juta	Rp. 500 Juta	Rp. 750 Juta	Rp. 750 Juta

5. Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff				TARGET AKHIR
			2013 - 2018	2019 - 2023	2024 - 2029	2030 - 2035	
1.	Meningkatnya Penggalan Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	Rp. 800 Juta	Rp. 1,208 M	Rp. 1,5 M	Rp. 2 M	Rp. 2 M
2.	Meningkatnya Objek Penelitian Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Penelitian Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah	Rp. 100 Juta	Rp. 200 Juta	Rp. 350 Juta	Rp. 550 Juta	Rp. 550 Juta
3.	Meningkatnya Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Persentase Meningkatnya Kerjasama	Rp. 250 Juta	Rp. 508 Juta	Rp. 750 Juta	Rp. 900 Juta	Rp. 900 Juta
4.	Deregulasi Kebijakan Dalam Penetapan Sumber Potensi	Persentase Meningkatnya Peraturan yang Diharmonisasi	Rp. 300 Juta	Rp. 500 Juta	Rp. 800 Juta	Rp. 1,2 M	Rp. 1,2 M

6. Sekretariat

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff				TARGET AKHIR
1.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah		2013 - 2018	2019 - 2023	2024 - 2029	2030 - 2035	
		Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan	Rp. 100	Rp. 200	Rp. 400	Rp. 600	Rp. 600
		Persentase Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran	Rp. 230 Juta	Rp. 550 Juta	Rp. 750 Juta	Rp. 950 Juta	Rp. 950 Juta
		Persentase Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	Rp. 200 Juta	Rp. 600 Juta	Rp. 800 Juta	Rp. 1,2 M	Rp. 1,2 M

7. UPTB Pusat Informasi dan Aplikasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff				TARGET AKHIR
			2013 - 2018	2019 - 2023	2024 - 2029	2030 - 2035	
1.	Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Rp. 4,2 M	Rp. 7,1 M	Rp. 8 M	Rp. 8,2 M	Rp. 8,2 M
2.	Meningkatnya Kerjasama Layanan Pada e commerce	Persentase Meningkatnya Kerjasama	Rp. 100 Juta	Rp. 200 Juta	Rp. 500 Juta	Rp. 800 Juta	Rp. 800 Juta
3.	Meningkatnya Digitalisasi Pembayaran Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Penggunaan Digitalisasi	Rp. 275 Juta	Rp. 568 Juta	Rp. 662 Juta	Rp. 810 Juta	Rp. 810 Juta
4.	Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	Persentase Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	Rp. 200 Juta	Rp. 500 Juta	Rp. 700 Juta	Rp. 900 Juta	Rp. 900 Juta
5.	Meningkatnya Kecepatan Internet	Kecepatan Layanan Internet up to 100 MBPs	Rp. 2,5 M	Rp. 3,7 M	Rp. 4,2 M	Rp. 5,01 M	Rp. 5,01 M

8. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff				TARGET AKHIR
			2013 - 2018	2019 - 2023	2024 - 2029	2030 - 2035	
1.	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Terhadap Target	Rp. 720 Juta	Rp. 908 Juta	Rp. 1,3 M	Rp. 1,6 M	Rp. 1,6 M
2.	Berkurangnya Tunggakan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Tunggakan Pajak	Rp. 620 Juta	Rp. 800 Juta	Rp. 910 Juta	Rp. 1,3 M	Rp. 1,3 M
3.	Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Rp. 300 Juta	Rp. 600 Juta	Rp. 800 Juta	Rp. 1,2 M	Rp. 1,2 M



B. Rincian Aktivitas Perencanaan Kinerja

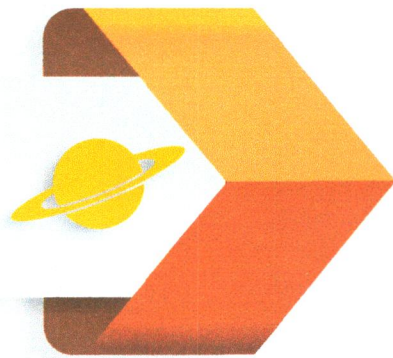
NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	
	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan	
		a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen
	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan keuangan	
		a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	422 Orang
		b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18 Orang
		c. Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan
	3.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	
		a. Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen
	4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan kepegawaian	
		a. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen
		b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang
	5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan umum layanan perkantoran	
		a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket
		b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket
		c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket
		d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
		e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	500 kali

			SKPD	
	6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	
	a.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket
	b.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit
	c.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit
	d.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit
	e.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit
	7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang perkantoran	
	a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
	b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
	c.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan
	d.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
	8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	
	a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	77 Unit
	b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit
	c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Rehabilitasi	30 Unit
II.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Penerimaan Dana Transfer	
	1.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pengelolaan keuangan daerah	
	a.	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1 Laporan
III	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	
	1.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan yang terselesaikan	
	a.	Perencanaan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Rencana	1 Dokumen

			Pajak Daerah	Pengelolaan Pajak Daerah	
		b.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	1 Dokumen
		c.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan
		d.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	30 Unit
		e.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan
		f.	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan
		g.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	1 Dokumen
		h.	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	1 Dokumen
		i.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	1 Dokumen
		j.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi daerah	1 Laporan



BAB IV PENUTUP



Dokumen Perencanaan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai wujud atas perencanaan kinerja yang akuntabel dalam melaksanakan tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah daerah. Dokumen Perencanaan Kinerja menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan kinerja yang dilakukan melalui program kegiatan sub kegiatan strategis untuk mendukung tujuan dan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2035. Dalam perencanaan tujuan dan sasaran strategis tersebut harus didukung ketersediaan dana dan sumber daya serta efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang berbasis kinerja.

Hasil evaluasi dan tindaklanjut dari pemantauan dan evaluasi kinerja menjadi rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kinerja pada periode jangka menengah, sehingga menunjukkan adanya komitmen yang jelas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang berkaitan dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Hal ini menjadi tagging pemantauan kinerja pada jangka menengah dan jangka pendek.

Demikian Dokumen Perencanaan Kinerja dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah selama kurun waktu periode jangka panjang serta bahan acuan perbaikan penyusunan perencanaan dan peningkatan kinerja pada periode jangka menengah dan jangka pendek.

Palembang, 15 Januari 2024

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



H. ACHMAD RIZWAN, S. STP., M.M
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19810923 200012 1 001